



ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALOKASI BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI SULAWESI SELATAN

Satmawati¹, ²Abd Rahim, ³Irwandi, ⁴Abdul Rajab, ⁵Diah Retno Dwi Hastuti

Satmawati153@gmail.com, abd.rahim@unm.ac.id, irwandi@unm.ac.id, abdulrajab@unm.ac.id, diah.retno@unm.ac.id.

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar

Informasi Artikel

History of Article

Received

Accepted

Published

Keywords:

PAD, DAU, PE, Alokasi Belanja Modal

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan utama Alokasi Belanja Modal (BM) pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pertumbuhan Ekonomi (PE). Urgensi studi ini didasari oleh pentingnya pengelolaan BM untuk peningkatan layanan publik di tengah tantangan fluktuasi realisasi anggaran daerah. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal-asosiatif, penelitian ini menggunakan data panel dari tiga wilayah representatif (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone) selama periode 2015–2024. Model *Fixed Effect* (FEM) yang digunakan memiliki daya prediksi yang sangat kuat dengan nilai *Adjusted R²* sebesar 0,9554. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PAD dan DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. PAD memfasilitasi investasi jangka panjang sesuai Teori Kapasitas Fiskal, sedangkan DAU bertindak sebagai stimulan pemerataan fiskal. Sebaliknya, Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap alokasi Belanja Modal. Temuan ini mengidentifikasi adanya diskoneksi antara kinerja ekonomi makro daerah dan kebijakan investasi mereka, menunjukkan bahwa keputusan alokasi Belanja Modal lebih didorong oleh ketersediaan likuiditas kas aktual (PAD dan DAU) daripada respons strategis terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Abstract

This study aims to analyse the main determinants of local government capital expenditure (BM) in South Sulawesi Province, focusing on local revenue (PAD), general allocation funds (DAU), and economic growth (PE). The urgency of this study is based on the importance of BM management for improving public services amid the challenges of fluctuating local budget realisation. Using a quantitative approach with a causal-associative design, this study utilises panel data from three representative regions (Makassar City, Gowa Regency, and Bone Regency) during the period 2015–2024. The Fixed Effect Model (FEM) used has a very strong predictive power with an Adjusted R^2 value of 0.9554. The results of the study conclude that PAD and DAU have a positive and significant effect on Capital Expenditure. PAD facilitates long-term investment in accordance with Fiscal Capacity Theory, while DAU acts as a stimulus for fiscal equalisation. Conversely, Economic Growth does not have a significant effect on Capital Expenditure allocation. This finding identifies a disconnect between regional macroeconomic performance and their investment policies, indicating that Capital Expenditure allocation decisions are driven more by the availability of actual cash liquidity (PAD and DAU) than by a strategic response to the rate of economic growth.

© 2023, Universitas Negeri Gorontalo

Corresponding author : Abd Rahim, Irwandi, Mahasiswa
Address: Jl. A.P. Pettarani No. 3, Kampus Gunung Sari Baru,
Makassar, Sulawesi Selatan
E-mail: Satmawati153@gmail.com

p-ISSN : 1979-1607

e-ISSN : 2747-0059

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah memegang peranan strategis dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, alokasi belanja modal menjadi instrumen fiskal yang vital untuk mewujudkan investasi pada infrastruktur dan aset-aset publik yang diharapkan mampu memberikan utilitas dan manfaat berkelanjutan. Tata kelola belanja modal yang optimal sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan daya saing yang berkelanjutan (Inikata, 2025).

Namun, pada tataran praktis, banyak wilayah administratif di Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan, masih menghadapi tantangan dalam pengalokasian belanja modal secara efisien dan efektif. Isu utama yang sering muncul adalah adanya fluktuasi realisasi belanja modal dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan ketidakseimbangan dalam fase perencanaan dan eksekusi anggaran (Irwandi et al., 2023).

Konteks wilayah Sulawesi Selatan menawarkan kasus yang menarik karena adanya disparitas fiskal dan pembangunan yang beragam antar daerah (Purwanto et al., 2022). Penelitian ini secara spesifik berfokus pada perbandingan alokasi belanja modal di Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Bone, yang dipilih karena secara jelas mewakili tiga tingkatan kemampuan keuangan daerah (kapasitas fiskal) yang berbeda, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Makassar, misalnya, memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi dan sangat mandiri, sementara Bone memperlihatkan tingkat kriteriasi yang substansial pada transfer fiskal Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat. Perbedaan yang kontras ini menciptakan dinamika penganggaran yang unik (Timilsina G & Stern D, 2024).

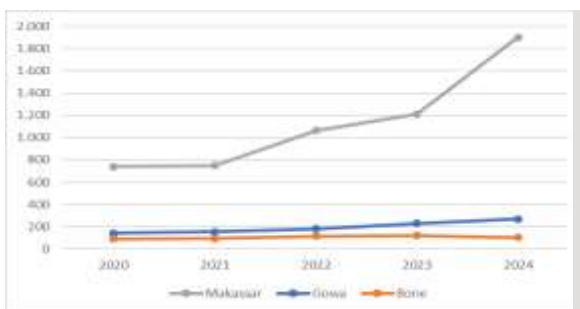
Tabel 1. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Sulawesi Selatan (2015-2024)

Tahun	Anggaran (Milliar Rupiah)	Realisasi (Milliar Rupiah)	Persentase Realisasi (%)
2015	1.654,20	1.423,56	86,06%
2016	1.501,00	1.362,78	90,82%
2017	1.720,00	1.529,44	88,91%
2018	1.890,00	1.674,19	88,58%
2019	2.185,00	2.002,31	91,63%
2020	1.679,00	1.117,52	66,58%
2021	1.525,00	1.290,14	84,61%
2022	1.602,00	1.643,87	102,61%
2023	2.220,00	2.114,25	95,24%
2024	2.150,00	1.874,91	87,21%

Sumber: DJPK & Laporan Realisasi APBD Sulawesi Selatan 2015-2024.

Tingkat realisasi rata-rata menunjukkan fluktuasi, di mana pada tahun 2019 mencapai lebih dari 90%, sementara pada tahun 2020 turun drastis menjadi hanya 66,58% akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan pengalihan anggaran untuk penanganan kesehatan dan bantuan sosial. Menariknya, pada tahun 2022 realisasi justru melampaui anggaran yang direncanakan (102,61%), yang dikenal sebagai fenomena belanja kejar target, yaitu percepatan pencairan anggaran di akhir tahun untuk menghindari SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

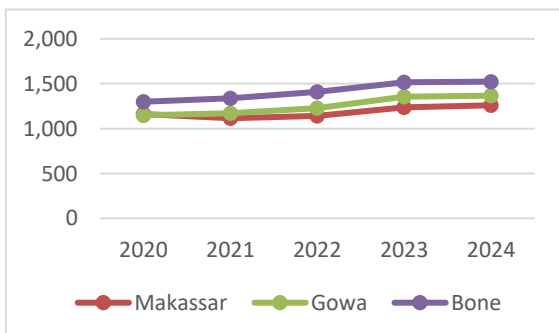
Menurut Suryatiningrum et al. (2020), besarnya PAD berbanding lurus dengan ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Daerah dengan PAD tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik untuk membiayai pembangunan infrastruktur tanpa ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pusat. Hal ini mendukung desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada daerah dalam merancang pembangunan sesuai kebutuhan lokal.



Gambar 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3 Daerah di Sulawesi Selatan (Juta Rupiah)

Sumber: BPS & DJPK, 2024.

Analisis data ini menunjukkan bahwa Makassar memiliki kemandirian finansial yang jauh lebih kuat dan terus berkembang pesat, sedangkan Gowa dan Bone terikat pada dana tranfer yang lebih besar dari pemerintah pusat. Perbedaan tersebut mencerminkan disparitas ekonomi yang signifikan antara ibu kota provinsi dan daerah penyangga serta kabupaten lainnya. Temuan ini selaras dengan pendapat pakar ekonomi daerah, seperti yang diungkapkan DJPK Kementerian Keuangan RI, yang menekankan bahwa, Kemandirian fiskal daerah tercermin dari kecakapan pemerintah dalam membiayai belanja dengan menggunakan PAD, sehingga ketergantungan terhadap sumber pembiayaan lainnya dapat berkurang (Kementerian Keuangan RI, 2023).



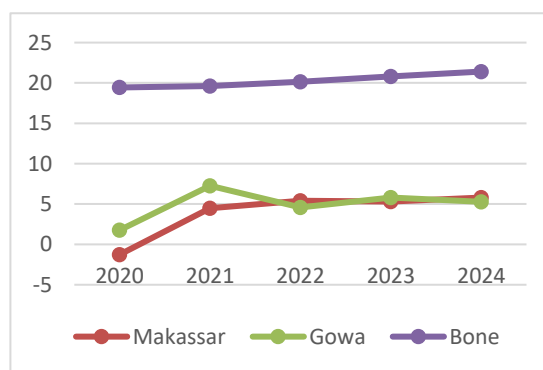
Gambar 2. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) 3 Daerah di Sulawesi Selatan (Juta Rupiah)

Sumber: DJPK, 2024.

Fluktuasi alokasi DAU dari tahun ke tahun umumnya terjadi akibat penyesuaian kebijakan pemerintah pusat dalam menghitung kebutuhan fiskal daerah. Faktor-faktor seperti indeks kemahalan konstruksi, kebutuhan belanja wajib pendidikan dan kesehatan, serta kapasitas fiskal daerah sangat memengaruhi besar kecilnya alokasi. Sebagai contoh, DAU Kota Makassar

sempat menurun pada tahun 2016–2017 karena adanya rasionalisasi belanja pemerintah pusat, sementara Kabupaten Bone tetap menunjukkan tren kenaikan karena tergolong sebagai daerah dengan kapasitas fiskal rendah dan kebutuhan belanja pelayanan dasar yang tinggi. Hal ini memperkuat peran DAU sebagai instrumen pemerataan fiskal antarwilayah (Kementerian Keuangan RI, 2023).

Pertumbuhan ekonomi ialah variabel penting guna mengevaluasi kerja makroekonomi daerah. Indikator ini sangat penting karena mencerminkan sejauh mana potensi pendapatan daerah dan kapasitas fiskal dapat ditingkatkan seiring dengan ekspansi kegiatan ekonomi. Secara teknis, perubahan pada PDRB nilai riil menunjukkan laju pertumbuhan riil dari aktivitas ekonomi, mengabaikan efek inflasi.



Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi 3 Daerah di Sulawesi Selatan (%)

Sumber: BPS Sulsel, 2024.

Analisis ini menunjukkan bahwa Bone memiliki kinerja pertumbuhan ekonomi terbaik secara konsisten. Namun, Makassar dan Gowa berhasil menunjukkan ketahanan dan kemampuan adaptasi yang baik, terbukti dari pemulihan kuat setelah dampak ekonomi tahun 2020, meskipun tingkat pertumbuhan mereka tidak setinggi dan tidak setabil Bone. Perbedaan ini mencerminkan dinamika ekonomi yang unik di setiap daerah, dipengaruhi oleh sektor-sektor utama dan respons terhadap kondisi makroekonomi. Fenomena ini sejalan dengan pernyataan BPS yang menyatakan bahwa, Pertumbuhan ekonomi wilayah sangat tergantung oleh struktur ekonomi yang dominan di daerah tersebut. Perbedaan sektor unggulan akan menghasilkan pola pertumbuhan yang berbeda (BPS, 2025). Hal ini menegaskan bahwa sektor-sektor utama di Bone, yang kemungkinan berbeda dari Makassar dan Gowa, berkontribusi pada pertumbuhan yang lebih stabil.

Sejalan dengan hal ini, beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan positif pertumbuhan ekonomi dengan belanja modal daerah. Misalnya, penelitian Sari & Hermanto (2018) mengemukakan bahwa daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat akan lebih cenderung mengarahkan anggaran belanja modal yang lebih substansial, guna memfasilitasi ekspansi ekonomi yang bersifat *sustainable*.

Studi terdahulu mengenai determinan Belanja Modal menunjukkan hasil yang beragam, beberapa penelitian mengonfirmasi pengaruh positif PAD dan DAU, sementara yang lain menemukan adanya diskoneksi pada variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE). Namun, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang nyata dalam literatur saat ini. Sebagian besar penelitian cenderung menggeneralisasi seluruh wilayah tanpa mempertimbangkan stratifikasi kapasitas fiskal. Selain itu, terdapat kekurangan analisis yang menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* (FEM) dengan variabel *dummy* wilayah untuk menangkap karakteristik spesifik antardaerah yang memiliki tingkat kemandirian berbeda.

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis komparatif pada tiga level kapasitas fiskal yang berbeda di Sulawesi Selatan, yaitu Kota Makassar (kapasitas tinggi), Kabupaten Gowa (kapasitas sedang), dan Kabupaten Bone (kapasitas rendah). Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris: (H1) pengaruh positif PAD terhadap Belanja Modal; (H2) pengaruh positif DAU terhadap Belanja Modal; dan (H3) pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal. Melalui pendekatan ini, diproyeksikan mampu memberikan kontribusi secara teoretis dan implementatif, terutama sebagai dasar pertimbangan bagi otoritas pemerintah daerah terkait menjalankan tata kelola keuangan dan menetapkan prioritas alokasi belanja modal yang lebih efektif (Juniawan A & Suryantini, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal-asosiatif yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab-akibat antar variabel secara empiris. Prosedur penelitian dimulai dari identifikasi fenomena fluktuasi belanja modal di Sulawesi Selatan, diikuti dengan pengumpulan data sekunder

secara longitudinal, pengujian asumsi klasik untuk memastikan model tidak bias, hingga penentuan model estimasi terbaik melalui uji formal data panel. Subjek atau partisipan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling untuk merepresentasikan tiga tingkatan kapasitas fiskal, yaitu Kota Makassar (kapasitas tinggi), Kabupaten Gowa (kapasitas sedang), dan Kabupaten Bone (kapasitas rendah). Dengan rentang waktu pengamatan selama 10 tahun dari tahun 2015 hingga 2024, penelitian ini menghasilkan total 30 unit observasi data panel yang dianalisis untuk mendapatkan gambaran perilaku anggaran yang komprehensif.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap laporan keuangan resmi yang telah dipublikasikan. Instrumen penelitian berupa lembar pencatatan data yang disusun berdasarkan kisi-kisi operasional variabel, meliputi Belanja Modal (Y) sebagai total realisasi belanja aset tetap, Pendapatan Asli Daerah (X1) sebagai cerminan kemandirian fiskal, Dana Alokasi Umum (X2) sebagai variabel transfer pusat, dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) sebagai indikator makro ekonomi. Seluruh data tersebut diukur dalam satuan Miliar Rupiah, kecuali variabel pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persentase. Proses validasi instrumen dalam penelitian ini dijamin melalui penggunaan data sekunder yang bersumber dari otoritas resmi, yakni Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS), di mana data tersebut telah melalui audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga memiliki reliabilitas hukum dan akademik yang kuat. Selain itu, validasi teknis dilakukan dengan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi kriteria *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diaplikasikan adalah estimasi Regresi Data Panel, dengan

menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model* sebagai model terpilih. Pemilihan model ini didasarkan pada karakteristik data yang menggabungkan dimensi waktu dan lokasi. Tahapan analisis data meliputi (1) Statistik Deskriptif: Menyediakan deskripsi data komprehensif untuk setiap variabel, meliputi nilai minimum, nilai maksimum, tendensi sentral (mean), dan ukuran dispersi (standar deviasi); (2) Pengujian Asumsi Klasik: Melakukan estimasi asumsi klasik yang esensial untuk regresi data panel, yaitu Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas, guna menjamin validitas dan reliabilitas model yang digunakan bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE); dan (3) Pengujian Hipotesis Uji Signifikansi Simultan (Uji F) digunakan untuk memvalidasi keberadaan pengaruh bersama variabel-variabel prediktor terhadap variabel kriteria. Uji Signifikansi Parsial (Uji t) diaplikasikan untuk menentukan signifikansi pengaruh tiap variabel prediktor secara independen. Sementara Koefisien Determinasi (R^2) berfungsi sebagai indikator kapasitas variabel prediktor dalam mengidentifikasi variasi pada variabel kriteria.

Pemilihan Model Data Panel

Untuk menentukan model estimasi yang paling tepat antara *Common Effect*, *Fixed Effect*, atau *Random Effect*, dilakukan serangkaian pengujian sebagai berikut:

Uji Chow: Memilih antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Fixed Effect Model* (FEM), Uji Hausman: Memilih antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM), Uji Lagrange Multiplier: Memilih antara *Common Effect Model* (CEM) atau *Random Effect Model* (REM).

Estimasi model regresi panel diestimasi menggunakan perangkat lunak statistik Eviews. Persamaan regresi data panel yang akan diuji diformulasikan sebagai berikut:

$$BMit = \beta_0 + \beta_1 PADit + \beta_2 DAUit + \beta_3 PEit + D1Kmks + D2KGowa + \epsilon it$$

Di mana: BMit adalah Belanja Modal kabupaten/kota i pada tahun t (variabel

prediktor); PADit adalah Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota i pada tahun t; DAUit adalah Dana Alokasi Umum kabupaten/kota i pada tahun t; PEit adalah Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota i pada tahun t; β_0 adalah Konstanta (*Intercept*); β_1 , β_2 , β_3 adalah Koefisien regresi masing-masing variabel Prediktor; D1,D2 adalah Koefisien regresi masing-masing variabel *dummy*; PAD adalah Pendapatan Asli Daerah (Milliar Rupiah); DAU adalah Dana Alokasi Umum (Milliar Rupiah); PE adalah Pertumbuhan Ekonomi (%); Kmks adalah 1 untuk Wilayah Makassar, 0 untuk lainnya; Kgowa adalah 1 untuk Wilayah Gowa, 0 untuk lainnya; Bone Sebagai Variabel Control; ϵit adalah Error Term; i adalah Indeks untuk individu (*cross-section*): 1 (Makassar), 2 (Gowa), 3 (Bone); t adalah Indeks untuk waktu (*time series*): 2015 sampai 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Analisis Deskriptif Data

	Belanja Modal	PAD	DAU	PE	D1	D2
Mean	2523168	4.31E+08	1.19E+09	6.082000	2523168	4.31E+08
Median	2267360	1.83E+08	1.15E+09	6.895000	2267360	1.83E+08
Maximum	4268800	1.90E+09	1.52E+09	9.060000	4268800	1.90E+09
Minimum	1472120	88060000	1.00E+09	-1.270000	1472120	88060000
Std. Dev.	778260.7	4.81E+08	1.41E+08	2.517121	778260.7	4.81E+08
Skewness	0.749389	1.288730	0.779238	-1.370017	0.749389	1.288730
Kurtosis	2.506138	3.793791	2.839428	4.656839	2.506138	3.793791
Jarque-Bera Probability	3.112791	9.095723	3.051345	12.81613	3.112791	9.095723
Sum	0.210895	0.010590	0.217475	0.001648	0.210895	0.010590
Sum Sq. Dev.						
Observations	30	30	30	30	30	30

Berdasarkan hasil olah data, diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar Rp. 88 Juta dan maksimum Rp. 1,9 Juta, dengan nilai rata-rata (Mean) sebesar Rp. 451 Juta serta standar deviasi Rp. 481 Juta. Nilai rata-rata yang tinggi menunjukkan bahwa PAD berperan penting dalam mendukung pembiayaan daerah, meskipun besarnya standar deviasi menggambarkan adanya kesenjangan fiskal yang cukup besar antarwilayah.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum Rp. 1 Juta dan maksimum Rp. 1,52 Juta, dengan rata-rata Rp. 1,19 Juta dan standar deviasi Rp. 141 Juta. Nilai ini menunjukkan bahwa DAU merupakan sumber pendanaan yang relatif stabil dan

memiliki kontribusi signifikan terhadap kapasitas belanja pemerintah daerah, meskipun masih terdapat variasi antar kabupaten/kota.

Sementara itu, Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki nilai minimum -1,27%, maksimum 21,41%, rata-rata 10,38%, dan standar deviasi 6,61%. Nilai rata-rata yang cukup tinggi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi antardaerah di Sulawesi Selatan cukup baik. Namun, besarnya standar deviasi menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi antar daerah dan antar tahun.

Variabel Belanja Modal memiliki nilai minimum 1.472.120 Juta Rupiah, maksimum 4.268.800 Juta Rupiah, dengan rata-rata 2.523.168 Juta Rupiah dan standar deviasi 778.260,7 Juta Rupiah. Nilai ini menunjukkan bahwa alokasi belanja modal sangat besar, tetapi memiliki variasi yang sangat tinggi antar daerah.

Secara keseluruhan, hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa PAD dan DAU memiliki peran dominan dalam struktur keuangan daerah dan menjadi penentu utama dalam pembiayaan belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan dinamika yang tinggi, namun belum tentu menjadi faktor utama dalam peningkatan kapasitas investasi daerah. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal masih menjadi instrumen utama dalam memperkuat pembangunan ekonomi daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel. 3. Hasil Estimasi Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada 3 Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan

Variabel Bebas	TH	Coefficient	Stand. Error	t-stat	Prob.	t-stat	VIF
PAD	+	0.000997	0.000169	5.324390	0.0000	1.697	8.092559
DAU	+	0.000986	0.000273	2.970889	0.0066	1.697	2.361105
PE	+	-373.5615	14088.40	-0.025432	0.9799	1.697	1.468913
Dummy Makassar		442546.1	221740.5	1.995784	0.0574		
Dummy Gowa		-412010.9	92547.75	-4.451874	0.0002		
Konstanta							898370.5
R ²							0.963124
Adjusted R-Squared							0.955442
F-stat							125.3660
F-stat							2.960
Prob. F							0.000000
Prob. Chi-Square (2)							0.9014
N							30

Estimasi model regresi yang disajikan pada Tabel. 3 menghasilkan persamaan yang diformulasikan sebagai berikut:

$$B_{Mit} = 898370.5 + 0.000997X_{1it} + 0.000986X_{2it} - 373.5615X_{3it} + 629028.5Mks - 252623.0Gowa + e_{it}$$

Penjelasan mengenai signifikansi dan implikasi dari persamaan tersebut dirincikan sebagai berikut:

Koefisien *intercept* sebesar 898370.5 mengisyaratkan bahwa, pada saat variabel PAD, DAU, dan Pertumbuhan Ekonomi tidak mengalami perubahan, pemerintah daerah tetap mengalokasikan belanja modal sebesar nilai tersebut. Hal ini menandakan adanya faktor lain di luar model seperti kebijakan fiskal, prioritas pembangunan, dan kebutuhan infrastruktur dasar yang tetap mendorong pengeluaran modal, bahkan ketika kapasitas fiskal daerah terbatas.

PAD sebagai variabel prediktor memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,000997, dengan tingkat probabilitas yang sangat signifikan (0,0000). Artinya, setiap kenaikan PAD sebesar 1 Miliar, maka alokasi Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,000997 Miliar atau setiap tambahan 1 Miliar Rupiah PAD berkontribusi langsung pada peningkatan belanja modal sebesar 0,000997 Miliar Rupiah.

Variabel DAU menunjukkan koefisien positif sebesar 0,000986 dengan tingkat signifikansi yang memadai (probabilitas 0,0066). Artinya, setiap kenaikan DAU sebesar 1 Miliar, maka akan mendorong kenaikan Belanja Modal sebesar 0,000986 Miliar atau setiap tambahan 1 Miliar Rupiah DAU berkontribusi langsung pada peningkatan belanja modal sebesar 0,000986 Miliar Rupiah.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki koefisien negatif sebesar -373.5615, namun tidak signifikan secara statistik (probabilitas 0,9799). Artinya, setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dampak marginal yang nyata terhadap penambahan Belanja Modal di ketiga wilayah penelitian.

Hasil estimasi mengindikasikan bahwa koefisien variabel *dummy* Makassar adalah 442546.1, dengan probabilitas $p = 0,0574$, yang melebihi batas signifikansi 5%. Nilai ini berarti bahwa dibandingkan daerah pembanding (Kabupaten Bone), Kota Makassar memiliki tingkat belanja modal yang lebih tinggi secara signifikan. Kondisi tersebut menggambarkan karakteristik Makassar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan administrasi yang memiliki kapasitas fiskal kuat serta kemandirian PAD yang tinggi. Besarnya investasi publik di Makassar mencerminkan peran strategis kota ini sebagai motor penggerak pembangunan di wilayah Sulawesi Selatan.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa koefisien variabel *dummy* Gowa adalah -412010.9, namun probabilitasnya (0,0002) berarti variabel tersebut signifikan pada tingkat kepercayaan 5%. Oleh karena itu, variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal Kabupaten Gowa memiliki belanja modal lebih rendah dibandingkan Bone, perbedaan tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, perbedaan karakteristik fiskal Gowa dan Bone tidak terlalu mencolok dalam konteks alokasi belanja modal. Temuan ini menunjukkan bahwa distribusi belanja antara daerah dengan kapasitas fiskal menengah dan rendah masih relatif setara karena keduanya bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas bertujuan memverifikasi apakah terdapat hubungan korelasi yang tinggi antarvariabel prediktor. Berdasarkan nilai VIF (indikator utama), hasil regresi pada Tabel. 3 memperlihatkan bahwa seluruh nilai VIF variabel (8.092559, 2.361103, dan 1.368913) berada di bawah kriteria 10. Hal ini mengonfirmasi bahwa variabel PAD, DAU, dan PE telah terbebas dari masalah Multikolinearitas. Hal ini mengonfirmasi bahwa variabel-variabel tersebut dapat digunakan secara bersamaan dalam model tanpa adanya distorsi akibat korelasi yang terlalu erat.

Uji Autokorelasi berfungsi untuk mendefinisikan keberadaan korelasi serial (hubungan berurutan) antara residual (kesalahan) pada satu waktu dengan residual pada observasi waktu sebelumnya. Uji ini dianalisis menggunakan nilai Durbin-Watson (DW). Hasil regresi pada Tabel. 3 menunjukkan nilai DW sebesar 2.0627. Nilai ini harus dibandingkan dengan nilai batas dL dan dU pada tabel Durbin-Watson. Namun, karena nilai ini berada cukup jauh di bawah 2 dan tidak ada nilai batas pembanding yang disediakan, ada potensi indikasi Autokorelasi Positif. Namun, untuk data panel seringkali digunakan uji yang lebih spesifik (seperti Uji Breusch-Godfrey) atau di atasi dengan *Robust Standard Errors*, yang juga menjadi solusi untuk heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Hasil uji simultan pada Tabel. 3 menunjukkan nilai Fhitung sebesar 125.3660 dengan Ftabel sebesar 2,960 serta nilai probabilitas 0,0000 ($<0,05$). Ditemukan bukti statistik bahwa seluruh variabel independen dalam model, apabila diuji secara serentak, terbukti memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap Belanja Modal. Konsekuensinya, model regresi ini memiliki *goodness of fit* yang memadai untuk menganalisis variasi pada Belanja Modal pemerintah daerah. Hasil analisis ini mempertegas kesimpulan bahwa variabel fiskal (PAD, DAU), indikator makro (Pertumbuhan Ekonomi), dan atribut daerah, apabila diuji secara kolektif merupakan determinan utama dalam menentukan besaran belanja investasi publik di tingkat daerah.

Pengujian parsial (Uji t) yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan bahwa PAD memiliki dampak positif yang signifikan secara statistik terhadap Belanja Modal ($t=5.524$; $\text{Sig}=0,0000$). Implikasinya, peningkatan PAD berkorelasi langsung dengan peningkatan kemampuan daerah dalam mendanai investasi publik. DAU juga berpengaruh positif dan signifikan ($t = 2,970$; $\text{Sig} = 0,0066$), menunjukkan peran penting dana transfer pusat dalam menopang

belanja modal bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Sementara itu, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan ($t = -0.025$; $Sig = 0,4039$), menandakan bahwa kebijakan belanja modal lebih ditentukan oleh faktor fiskal daripada kondisi ekonomi riil. Adapun *Dummy* Makassar berpengaruh positif signifikan, sedangkan *Dummy* Gowa tidak signifikan, menunjukkan bahwa perbedaan kapasitas fiskal antarwilayah turut memengaruhi besaran alokasi belanja modal.

Nilai *Adjusted R²* pada Tabel 3. sebesar 0,9554 menunjukkan bahwa 95,54% variasi belanja modal pada ketiga daerah penelitian (Makassar, Gowa, dan Bone) dapat dijelaskan oleh variabel PAD, DAU, pertumbuhan ekonomi, serta karakteristik daerah (*dummy*). Adapun 4,46% dari total variasi dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdefiniskan dalam model. Nilai *Adjusted R²* yang sangat tinggi tersebut menegaskan validitas dan relevansi model dalam mengestimasi hubungan antara variabel-variabel fiskal dan belanja modal pemerintah daerah.

Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal di 3 Daerah Sulawesi Selatan

Variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan kepada Belanja Modal. Koefisien regresi yang positif memperlihatkan adanya peningkatan PAD akan diikuti oleh peningkatan alokasi Belanja Modal dengan nilai probabilitas yang sangat rendah (0,0000). Hal ini mengindikasikan bahwa PAD secara signifikan memengaruhi Belanja Modal pada tingkat kepercayaan yang tinggi. Hasil tersebut mendukung hipotesis, semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah tersebut untuk mengalokasikan dananya pada Belanja Modal.

Secara empiris di lapangan, daerah dengan PAD tinggi di Sulawesi Selatan (seperti Kota Makassar) menunjukkan komitmen Belanja Modal yang konsisten tertinggi, menggunakan keleluasaan dana ini untuk

membiayai pembangunan dan perbaikan aset fisik.

Temuan ini juga sejalan dengan studi sebelumnya oleh Antari & Sedana (2018) serta Suryatiningrum I et al. (2020), yang sama-sama menemukan hubungan positif antara PAD dan Belanja Modal, memperkuat kesimpulan bahwa PAD adalah pendorong utama otonomi dan pembangunan daerah. Secara teoritis, temuan ini memvalidasi Teori Kapasitas Fiskal, di mana daerah dengan PAD tinggi seperti Kota Makassar memiliki keleluasaan lebih besar untuk mendanai proyek infrastruktur tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pusat. Namun, tingginya koefisien PAD ini juga mengindikasikan bahwa alokasi Belanja Modal di wilayah studi masih sangat bersifat *revenue-driven* atau berorientasi pada pendapatan, di mana belanja modal hanya akan naik jika pendapatan daerah meningkat secara aktual.

Pengaruh DAU terhadap Belanja Modal di 3 Daerah Sulawesi Selatan

Temuan analisis menunjukkan bahwa variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kota di Sulawesi Selatan. Hasilnya menunjukkan koefisien regresi DAU bernilai positif yang didukung oleh tingkat signifikansi 0,0066. Hasil ini berarti bahwa peningkatan jumlah DAU yang diterima oleh pemerintah wilayah secara statistik akan menambah alokasi anggaran untuk Belanja Modal. DAU terbukti menjadi sumber pembiayaan yang efektif dan substansial dalam mendorong investasi aset tetap di daerah.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa transfer DAU menopang Belanja Modal untuk pembangunan fasilitas publik seperti renovasi sekolah, pasar, dan jaringan irigasi, yang merupakan pemenuhan standar minimal pelayanan. Hasil ini konsisten dengan temuan studi Huda S & Sumiati A (2019) dan Setiawan P et al. (2021) yang mengidentifikasi hubungan positif antara variabel DAU dan Belanja Modal.

Temuan ini juga sejalan dengan studi Maryani et al. (2023) yang mengonfirmasi bahwa DAU tetap menjadi instrumen penting

dalam pemerataan pembangunan wilayah. Dalam konteks Teori Desentralisasi Fiskal, khususnya aspek Pemerataan Fiskal (*Fiscal Equalization*), temuan ini membuktikan bahwa DAU telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai instrumen transfer pusat (Huda S & Sumiati A, 2019).

Secara teoritis, DAU bersifat *block grant* yang seharusnya lebih banyak terserap untuk belanja pegawai (biaya rutin). Namun, hasil penelitian di Makassar, Gowa, dan Bone menunjukkan bahwa kenaikan DAU tetap memberikan ruang bagi penambahan belanja modal. Hal yang mendasarinya adalah adanya "ruang fiskal sisa" yang artinya ketika kebutuhan rutin minimal sudah terpenuhi oleh DAU, maka sisa dana tersebut dialokasikan untuk infrastruktur. Hal ini mempertegas bahwa ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat masih menjadi karakteristik dominan dalam postur APBD di Sulawesi Selatan.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal di 3 Daerah Sulawesi Selatan

Analisis menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) secara statistik tidak memengaruhi Belanja Modal secara signifikan dengan nilai probabilitas 0,4039 (> 0,05). Temuan ini kontradiktif dengan asumsi makroekonomi klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tinggi seharusnya memicu kebutuhan investasi infrastruktur yang lebih besar (efek akselerasi). Akan tetapi, hasil ini sejalan dengan penelitian Marseno & Mulyani (2020) yang menemukan fenomena serupa di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Hal yang menjelaskan ini adalah adanya kekakuan anggaran (*budgetary rigidity*). Di daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif (seperti Gowa dan Bone), pemerintah daerah cenderung mengutamakan mandatory spending (pendidikan dan kesehatan) serta belanja operasional dibandingkan merespons sinyal pertumbuhan ekonomi makro. Dengan kata lain, kebijakan belanja modal di wilayah studi lebih dipengaruhi oleh ketersediaan kas riil (likuiditas) daripada

indikator pertumbuhan ekonomi makro yang bersifat statistik.

Hasil penelitian ini bertolak belakang yang dilakukan oleh Sari & Hermanto (2018) dan Timilsina et al. (2024) mendukung hubungan positif. Dengan demikian, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa meskipun Pertumbuhan Ekonomi yang positif diharapkan dapat mendorong alokasi Belanja Modal yang lebih tinggi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan investasi pemerintah daerah belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika ekonomi riil wilayah.

Meskipun secara teoritis Teori Pertumbuhan Endogen menekankan bahwa Belanja Modal harus menjadi katalis untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan, kenyataan di daerah studi menunjukkan bahwa keputusan penganggaran Belanja Modal lebih didorong oleh ketersediaan kas aktual (PAD dan DAU) dan kebutuhan mendesak, bukan respons strategis terhadap laju pertumbuhan PDRB.

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal dapat dijelaskan oleh Teori Pertumbuhan Endogen, yang menempatkan Belanja Modal sebagai kunci pendorong pertumbuhan berkelanjutan. Berdasarkan teori ini, pertumbuhan yang pesat seharusnya memicu Belanja Modal yang lebih besar. Namun, hasil studi ini menyimpang, karena tidak ditemukan hubungan signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal di wilayah kabupaten/kota Sulawesi Selatan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks dalam alokasi anggaran di Sulawesi Selatan, di mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Namun, temuan ini justru bertentangan dengan asumsi teori desentralisasi fiskal dan prinsip pemerataan, karena peningkatan PAD dan DAU cenderung lebih banyak terserap untuk membiayai belanja rutin serta kebutuhan operasional dibandingkan menjadi pendorong utama investasi fisik atau pembangunan. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi ditemukan tidak

memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, yang mengindikasikan bahwa capaian makroekonomi daerah belum terintegrasi secara langsung ke dalam keputusan politik anggaran. Secara keseluruhan, mekanisme alokasi anggaran masih didominasi oleh faktor internal sehingga belum efektif dalam mentransformasikan potensi fiskal menjadi belanja produktif. Oleh karena itu, penguatan sumber pendapatan dan optimalisasi pemanfaatan dana transfer menjadi kunci krusial untuk mendorong peningkatan investasi fisik di masa mendatang.

Kontribusi teoretis utama dari studi ini adalah teridentifikasinya diskoneksi antara kinerja ekonomi riil dan kebijakan penganggaran investasi, sebagaimana ditunjukkan oleh kesimpulan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi secara statistik tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penetapan Alokasi Belanja Modal. Hal ini merefleksikan bahwa keputusan alokasi anggaran daerah lebih didorong oleh ketersediaan likuiditas (kas aktual dari PAD dan DAU) daripada respons strategis terhadap laju pertumbuhan makroekonomi. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk: Menguji Efek Flypaper dari DAU secara lebih mendalam untuk mengetahui apakah dana transfer lebih mudah dibelanjakan untuk Belanja Modal dibandingkan PAD; Memasukkan variabel kualitas belanja atau efektivitas penyerapan anggaran untuk mengevaluasi dampak akhir Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi; Melakukan studi kualitatif untuk mengidentifikasi hambatan birokrasi dan institusional yang menyebabkan Pertumbuhan Ekonomi daerah tidak dijadikan variabel utama dalam perumusan kebijakan alokasi dana untuk investasi modal.

REFERENSI

- Antari, & Sedana. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2).
- BPS. (2025). *BPS*. <https://www.bps.go.id/>
- Huda S, & Sumiati A. (2019). Pengaruh Pad, Dau, Dan Dak Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 14(1), 85–100.
- Inikata. (2025, January). *Realisasi APBD Makassar 2024 Sentuh Angka 78 Persen, 2 OPD Dapat Rapor Merah*. <https://inikata.co.id/2025/01/realisasi->
- Apbd-Makassar-2024-Sentuh-Angka-78-Persen-2-Opd-Dapat-Rapor-Merah/.
- Irwandi, I., Regina, R., Paramita, A., Muhliza, N. M., & Wilina, E. (2023). Analysis of the effect of poverty, unemployment, and population on economic growth in North Kalimantan 2015-2022. *Bata Ilyas Journal of Accounting*, 3(4).
- Juniawan A, & Suryantini. (2018). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(3).
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Kementerian Keuangan RI*. <https://www.kemenkeu.go.id/home>.
- Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3452–3467.
- Maryani, Zamzami, & Achmad. (2023). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2007-2021. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(2), 1875.
- Purwanto, Indrawan, R., & Heryanti. (2022). Capital Expenditure Allocation Analysis Of Local Governments. *International Journal of Science*, 3(2), 453–460.
- Sari, I. N., & Hermanto, S. B. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 7(12).
- Setiawan P, Widiyanti R, Siregar, Nurhaida N, & Oktavia E. (2021). Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016. *Jurnal Ekonomi*, 7(1), 44–53.
- Suryatiningrum I, Indarti, & Adnanti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan Pendapatan Per Kapita sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Aset*, 22(2), 131–146.
- Timilsina G, & Stern D. (2024). Physical infrastructure and economic growth. *Applied Economics*, 56(18), 2142–2157.